

PERAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN TERUMBU KARANG DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN

Widayatun

Pusat Penelitian Kependudukan–LIPI.

E-mail: wida1960@yahoo.com

Abstract

As an Archipelago, Indonesia consists of more than 18.000 islands, locating at the heart of the World 'Coral Triangle'. This country is well known as the highest coral reef biodiversity, especially in Raja Ampat, Selayar, Banda and Bunaken. This potential resource, however, in some places has been destroyed, due to overfishing and destructive fishing practices. The Indonesian government, to address these threats has developed Coral Reefs Rehabilitation and Management Program or Coremap since the 2006. Coremap aims to manage, rehabilitate and protect coral reefs to ensure sustainable utilization of these marine resources for reducing poverty of coastal community and increasing their welfare. Coremap focuses on collaborative management by involving communities, local and national governments, NGOs and other relevant stakeholders. This paper is based on data from the 2008 and 2011 studies on socio-economic aspects of coral reefs in Coremap locations in the eastern part of Indonesia. The studies applied a combination between quantitative (survey) and qualitative (indepth interview and focus group discussions) approaches. The study results informed that community has quite high participation in the management and their welfare also tends to increase during this period.

Keywords: coral reefs rehabilitation, community participation and roles, welfare

Abstrak

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri atas lebih dari 18.000 pulau di jantung segitiga karang dunia yang terkenal akan keanekaragaman hayati, khususnya terumbu karang yang tertinggi di dunia. Wilayah perairan di sekitar Raja Ampat, Banda, Selayar, dan Bunaken yang terkenal mempunyai hamparan terumbu karang dengan keanekaragaman hayati yang tinggi. Meskipun demikian, sumber daya laut yang kaya ini telah mengalami kerusakan di berbagai lokasi karena pemanfaatan berlebih dan kegiatan penangkapan yang merusak. Untuk menekan laju kerusakan terumbu karang tersebut, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program yang bertujuan untuk merehabilitasi dan melestarikan terumbu karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan yang dikenal dengan Coral Reefs Rehabilitation and Management Program (Coremap). Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Coremap adalah pengelolaan berbasis masyarakat dengan melibatkan pemerintah,

lembaga non-pemerintah, dan *stakeholders* terkait. Tulisan ini mendiskusikan peran masyarakat dalam pelestarian terumbu karang melalui kegiatan Coremap dan dampaknya terhadap kesejahteraan. Data dan informasi yang digunakan adalah studi aspek sosial-ekonomi terumbu karang yang dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011. Studi tersebut dilakukan dengan menggunakan kombinasi pendekatan kuantitatif (survei) dan kualitatif (wawancara terbuka dan *focus group discussion*). Hasil studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelestarian terumbu karang cukup tinggi dan kesejahteraannya juga menunjukkan peningkatan pada periode tersebut.

Kata Kunci: Pelestarian terumbu karang, peran masyarakat, kesejahteraan masyarakat

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di segitiga karang dunia (*Coral Triangle*). Wilayah Indonesia sangat luas, membentang sepanjang hampir 5.000 km dengan lebar 2.000 km, terdiri atas 18.110 pulau, dengan panjang garis pantai 108.920,40 km. Dengan wilayah yang cukup luas tersebut, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya hayati laut yang besar di antaranya terumbu karang. Luas terumbu karang dunia mencapai 284.300 km², sekitar 18% (85.200 km²) di antaranya berada di wilayah Indonesia. Terumbu karang Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, lebih dari 2.500 jenis ikan, 590 jenis karang batu, 2.500 jenis moluska, dan 1.500 jenis udang-udangan. Sampai saat ini, telah tercatat lebih dari 750 jenis karang yang termasuk ke dalam 75 marga terdapat di Indonesia. Meskipun demikian, sebagian kondisi terumbu karang di Indonesia telah mengalami kerusakan karena faktor alam maupun akibat dari aktivitas manusia. Hasil penelitian di 1.076 stasiun oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tahun 2011 menunjukkan bahwa 30,76% terumbu karang di Indonesia memiliki kondisi yang kurang baik atau rusak. Sementara itu, terumbu karang yang berada dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,58%, 26,95% berkondisi baik, dan sisanya 36,90% cukup baik.¹

Kerusakan terumbu karang disebabkan oleh berbagai faktor yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan manusia. Kerusakan karena aktivitas manusia berkaitan dengan penggunaan alat tangkap dan cara penangkapan ikan yang merusak ekosistem ini, seperti penggunaan bom, racun, ataupun pukat harimau. Meningkatnya kerusakan terumbu karang dari tahun ke tahun akan berdampak buruk terhadap kesejahteraan penduduk yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau kecil yang umumnya sangat menggantungkan kehidupan mereka pada pemanfaatan sumber daya laut.

¹ Suharsono, 2010; www.Coremap.or.id; <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/31/061438910/Sepertiga-Terumbu-Karang-di-Indonesia-Rusak>

Dalam rangka mengurangi laju kerusakan terumbu karang, pemerintah Indonesia pada tahun 1998 meluncurkan Program Rehabilitasi dan Pengelolaan Terumbu Karang (*Coremap–Coral Reef Management and Rehabilitation Program*). Coremap bertujuan untuk menyelamatkan terumbu karang Indonesia agar dapat dimanfaatkan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat. Secara khusus, program tersebut bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola pemanfaatan terumbu karang serta ekosistemnya secara lestari sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program ini diimplementasikan di beberapa provinsi, meliputi delapan kabupaten di wilayah Indonesia bagian Barat dan tujuh kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur.

Upaya pelestarian terumbu karang melalui Coremap dilaksanakan melalui lima komponen utama, yaitu penguatan kelembagaan, penyadaran masyarakat, pengelolaan berbasis masyarakat, riset, dan monitoring serta pengawasan pencegahan dan penegakan hukum. Sementara itu, pelaksanaannya dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap inisiasi untuk tiga tahun pertama, tahap akselerasi untuk enam tahun kedua, dan tahap pelembagaan untuk enam tahun terakhir. Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Coremap adalah pengelolaan berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring program. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, masyarakat, yang merupakan pengguna utama sumber daya laut, diharapkan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan terumbu karang yang ada di wilayahnya.

Tulisan ini bertujuan untuk memahami peran masyarakat dalam pelestarian terumbu karang melalui pelaksanaan kegiatan Coremap dan mengkaji dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi Coremap wilayah Indonesia bagian timur. Data dan informasi yang digunakan bersumber pada hasil *Benefit Monitoring and Evaluation* (BME) sosial-ekonomi Coremap tahun 2008 dan 2011 di tujuh kabupaten di Indonesia bagian timur, yaitu Kabupaten Biak, Raja Ampat, Wakatobi, Buton, Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Selayar, dan Sikka.

BME sosial-ekonomi menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei terhadap 180–240 rumah tangga pada desa-desa sampel di tiap lokasi (kabupaten). Data kuantitatif meliputi karakteristik demografi anggota rumah tangga dan kondisi ekonomi rumah tangga. Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, *focus group discussion/FGD*, dan kaji bersama. Pengumpulan data kualitatif dimaksudkan untuk menggali lebih dalam kondisi kehidupan masyarakat dan kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang.

KEGIATAN COREMAP

Pada awal program, kegiatan Coremap difokuskan pada kegiatan penyadaran masyarakat (*public awareness*). Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pelestarian terumbu karang. Kegiatan ini sangat penting karena kerusakan terumbu karang di Indonesia terutama disebabkan oleh perilaku manusia yang merusak, di samping karena faktor alam. Kegiatan penyadaran masyarakat pada awal program secara intensif dilaksanakan di tingkat nasional melalui kampanye di media elektronik (TV, radio), penyebaran *leaflet* dan *brossure* serta menyelenggarakan kegiatan seminar. Sementara itu, di tingkat kabupaten dan desa, penyadaran masyarakat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyuluhan masyarakat, pemutaran film, penyebaran brosur dan poster serta papan pengumuman. Selain itu, Coremap juga mengembangkan pendidikan melalui jalur formal dalam bentuk muatan lokal terumbu karang/kelautan di sekolah-sekolah dalam upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang pada anak-anak yang dimulai dari usia dini.

Untuk mendukung pelaksanaan Coremap dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pengelolaan terumbu karang, di tingkat desa dibentuk kelembagaan yang mengelola kegiatan Coremap. Lembaga tersebut dikenal dengan nama Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Di tingkat masyarakat dibentuk kelompok masyarakat (pokmas) yang terdiri atas Pokmas putra, kelompok perempuan/gender, dan kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas).

Kegiatan Coremap di tingkat desa di antaranya adalah kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) melalui pemberian dana bergulir (*seed fund*), pembangunan sarana fisik desa (*village grant*), dan pengawasan terumbu karang serta pembentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL). Pelaksanaan kegiatan UEP dilaksanakan dan dikelola oleh LKM. Kegiatan pembangunan sarana fisik dilaksanakan oleh LPSTK, sedangkan kegiatan pengawasan dan pembentukan DPL dilakukan oleh pokmaswas dan dikoordinasi oleh LPSTK. Pembentukan kelembagaan tersebut sudah dimulai sejak tahun 2006.

UEP merupakan salah satu kegiatan Coremap yang bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberikan bantuan modal melalui dana bergulir pada kelompok masyarakat di lokasi Coremap. Dana tersebut diharapkan dapat bergulir kembali untuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang belum mendapatkan. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk insentif yang diberikan kepada masyarakat

pesisir untuk digunakan sebagai modal melakukan kegiatan ekonomi produktif yang tidak merusak lingkungan. Besarnya modal yang diberikan melalui dana bergulir ini bervariasi untuk tiap desa yang disesuaikan dengan perencanaan dan kebutuhan masing-masing. Jenis usaha ekonomi yang dikembangkan di tiap-tiap desa cukup beragam, di antaranya kegiatan yang berkaitan dengan perikanan tangkap, budi daya (seperti budi daya rumput laut), dan kegiatan perdagangan (pembuatan kue, pedagang pengumpul ikan, atau pedagang sembako). Selain bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, berkembangnya kegiatan ekonomi produktif di masyarakat di lokasi Coremap juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya terumbu karang.

Pembangunan sarana fisik desa melalui *village grant* dimaksudkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan dan pelestarian terumbu karang serta pemberdayaan masyarakat. Jenis sarana fisik yang dibangun diusulkan dan disepakati bersama oleh masyarakat sendiri melalui musyawarah yang dikoordinasi oleh LPSTK. Usulan dan kesepakatan tentang jenis bangunan sarana fisik desa tersebut dicantumkan dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Terumbu Karang yang ada di masing-masing desa lokasi Coremap. Jenis sarana fisik yang dibangun di antaranya adalah sarana MCK, dermaga, jembatan, pagar jalan desa, talut (pemecah ombak), instalasi listrik (*genset*), renovasi bangunan sanggar PKK, dan perbaikan/pemugaran sarana ibadah.

Kegiatan pengawasan terumbu karang dimaksudkan untuk mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang dapat merusak terumbu karang, seperti penggunaan bom, bius, dan pukat harimau dalam penangkapan ikan. Untuk mendukung kegiatan ini, Coremap memfasilitasi perahu dan peralatan patroli, seperti lampu, senter, dan GPS. Di tiap lokasi kegiatan ini dilakukan oleh pokmaswas yang sudah dibentuk pada awal program.

Kegiatan Coremap yang langsung berkaitan dengan pelestarian sumber daya laut adalah pembentukan daerah perlindungan laut (DPL). Pembentukan DPL bertujuan untuk menghentikan atau menanggulangi perusakan habitat akibat pemanfaatan yang berlebihan terhadap potensi sumber daya pesisir dan menjaga keanekaragaman hayati. Adanya DPL diharapkan menjadi lokasi stok ikan dan bermanfaat bagi peningkatan produksi ikan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Pembentukan DPL juga bertujuan meningkatkan kemampuan serta kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memelihara sumber daya perairan. Selain itu, DPL juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan dan laboratorium alam untuk kegiatan penelitian.

PERAN MASYARAKAT DALAM KEGIATAN COREMAP

Peran masyarakat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan keberlanjutan suatu program pembangunan. Peran masyarakat merupakan upaya pengambilan bagian dalam suatu kegiatan bersama, diindikasikan dari partisipasi atau keikutsertaan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar (Ndraha, 1990). Sementara itu, World Bank mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan adalah *A process through which stakeholders influence and share control over development initiatives, and the decisions and resources which affect them* atau partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan selayaknya mencakup keseluruhan proses mulai dari awal sampai tahap akhir. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan mencakup empat jenjang meliputi partisipasi dalam proses pembentukan keputusan; pelaksanaan, pemanfaatan hasil; dan partisipasi dalam evaluasi (World Bank, 1995).

Konsep tersebut memberikan makna bahwa masyarakat akan berpartisipasi secara sukarela apabila mereka dilibatkan sejak awal dalam proses pembangunan melalui program pemberdayaan. Ketika masyarakat mendapatkan manfaat dan merasa memiliki terhadap program, akan dapat dicapai suatu keberlanjutan dari program pemberdayaan.

Dalam upaya melibatkan partisipasi masyarakat, sebelum dilakukan pembentukan kelembagaan, di tiap desa yang menjadi lokasi Coremap terlebih dahulu dilaksanakan sosialisasi tentang pentingnya Coremap. Kegiatan ini dilakukan oleh pengelola Coremap di tingkat kabupaten dan fasilitator Coremap yang bertugas di desa. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, di antaranya pertemuan desa, rapat PKK, pertemuan remaja, dan pemasangan poster. Dalam sosialisasi, masyarakat diberikan pemahaman tentang tujuan, program, dan kegiatan Coremap yang akan dilaksanakan di desa. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

Peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Coremap dalam kajian ini dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan Coremap yang berkaitan dengan pembentukan kelembagaan dan pengembangan rencana kegiatan, yaitu pembentukan LPSTK dan pengembangan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). Selanjutnya, peran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Coremap juga dikaji dari keterlibatannya dalam pokmas UEP dan Pokmas Konservasi serta peran masyarakat dalam pembangunan prasarana dan sarana desa serta pembentukan DPL.

Keterlibatan dalam Pembentukan LPSTK

LPSTK merupakan lembaga pengelola terumbu karang di tingkat desa yang diharapkan berperan dalam mengkoordinir dan melaksanakan berbagai kegiatan Coremap mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasannya. Struktur organisasi ini terdiri atas ketua, sekretaris bendahara, dan anggota dari masing-masing perwakilan Pokmas. Sesuai dengan pendekatan Coremap, pembentukan LPSTK ini diharapkan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam panduan tentang pembentukan kelembagaan disebutkan bahwa pembentukan LPSTK dan Pokmas melibatkan berbagai pihak di antaranya pemimpin formal dan informal, perwakilan masyarakat nelayan, dan perwakilan dari kelompok ibu-ibu.

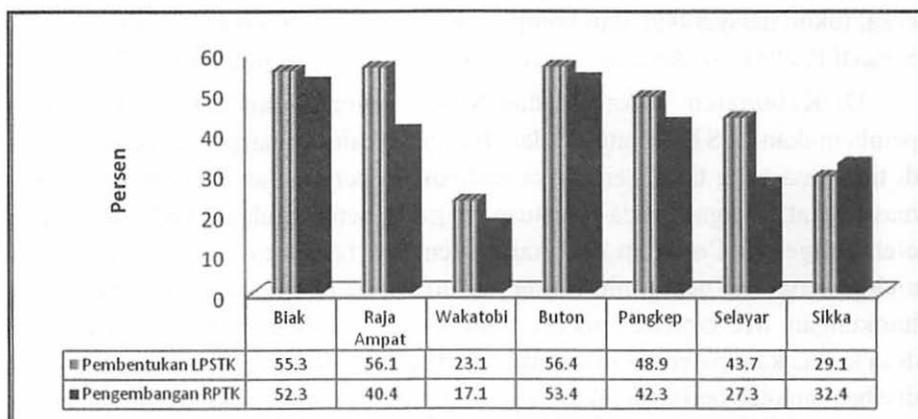
Hasil BME sosial-ekonomi tahun 2008 menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan LPSTK cukup bervariasi menurut lokasi. Keterlibatan yang cukup tinggi terdapat di Kabupaten Biak, Raja Ampat, dan Buton di mana lebih dari 50% responden terlibat dalam pembentukan LPSTK. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembentukan LPSTK di Kabupaten Biak dan Raja Ampat terkait dengan proses pembentukan yang melibatkan “tiga tungku”, yaitu pemimpin formal (kepala desa dan aparat), pemimpin adat, dan pemimpin agama serta anggota masyarakat lainnya. Keterlibatan ketiga unsur pimpinan di desa tersebut menjadi faktor pendorong keikutsertaan anggota masyarakat lainnya. Di samping itu, desa atau kampung di kedua kabupaten ini jumlah penduduknya relatif sedikit dan wilayahnya tidak terlalu luas sehingga memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam setiap pertemuan desa. Di Kabupaten Buton, proses pembentukan LPSTK dilakukan secara musyawarah dan dihadiri lebih dari 80 orang terdiri atas anggota masyarakat, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, dan komponen masyarakat lainnya (Romdiati dan Sri Sunarti P, 2011; Widayatun dan Situmorang, 2011 dan Asiati dkk., 2011).

Di Kabupaten Wakatobi dan Sikka, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan LPSTK relatif rendah. Hal ini terkait dengan proses pembentukan di tiap desa yang tidak semuanya melibatkan perwakilan dari berbagai unsur masyarakat. Mengacu pada ketentuan yang ada, pembentukan LPSTK difasilitasi oleh pengelola Coremap dari kabupaten dan fasilitator desa yang dihadiri oleh peserta dari pemimpin formal, informal, dan perwakilan masing-masing lingkungan. Meskipun demikian, tidak semua pembentukan LPSTK di desa-desa kedua kabupaten ini melibatkan berbagai pihak tersebut. Alasannya dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tidak ada perwakilan karena tempat tinggalnya cukup jauh dan adanya pemekaran desa (Hidayati dkk., 2011 dan Daliyo dkk., 2011).

Keterlibatan dalam Pengembangan RPTK

RPTK merupakan acuan penting untuk pelaksanaan kegiatan Coremap di tingkat desa. Oleh karena itu, idealnya penyusunan RPTK dilakukan secara terpadu dan komprehensif yang mencakup semua kegiatan pemanfaatan terumbu karang secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam RPTK disusun dan dikembangkan sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat yang menjadi pengguna utama dari sumber daya laut.

Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPTK di wilayah Coremap Indonesia bagian timur cukup bervariasi. Terdapat dua kabupaten yang keterlibatan masyarakatnya dalam penyusunan RPTK relatif baik, yaitu Kabupaten Biak dan Buton. Sementara itu, di kabupaten lainnya, keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPTK masih relatif rendah. Bervariasinya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPTK berkaitan dengan proses penyusunan yang berbeda-beda. Terdapat sedikitnya dua pola dalam proses penyusunan RPTK di tujuh kabupaten lokasi Coremap. Pola pertama adalah pengurus LPSTK dan LKM didampingi oleh fasilitator dalam membuat *draft* rancangan RPTK. Setelah *draft* rancangan selesai disusun, *draft* disampaikan dalam forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai unsur masyarakat. Pola yang kedua adalah LPSTK dan LKM didampingi oleh fasilitator membuat *draft* RPTK dan peran fasilitator cukup dominan dalam penyusunan rancangan tersebut. Setelah *draft* rancangan tersusun, *draft* didiskusikan ke dalam kelompok kecil yang dihadiri oleh warga masyarakat, tetapi sifatnya terbatas.



Sumber: BME Sosial-Ekonomi, Coremap-LIPI, tahun 2008

Diagram 1. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan LPSTK, pembentukan pok-mas, dan pengembangan RPTK di Lokasi Coremap Indonesia Bagian Timur, 2008

Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

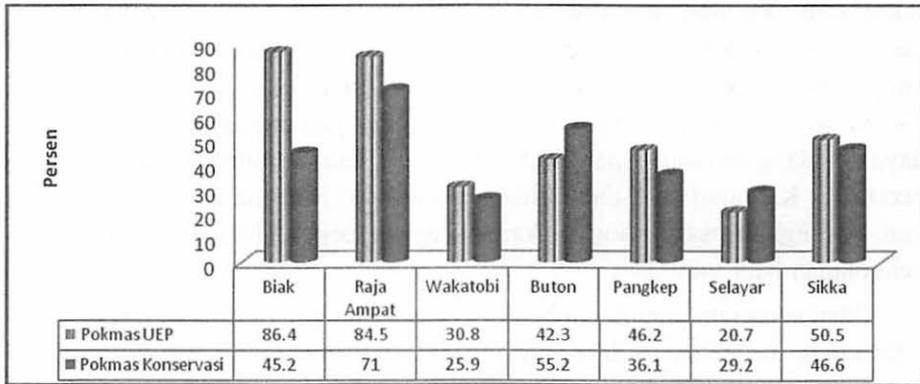
Jenis kegiatan UEP yang dilaksanakan oleh masyarakat pada tiap desa lokasi Coremap disesuaikan dengan ketrampilan dan potensi sumber daya alam lokal yang ada dan bisa dikembangkan. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini tidak hanya kelompok nelayan, tetapi juga ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak bekerja. Kegiatan usaha ekonomi produktif yang dikembangkan cukup beragam meliputi kegiatan penangkapan hasil laut, budi daya di bidang perikanan, pengolahan hasil laut serta kegiatan perdagangan dan pertanian. Kegiatan budi daya bidang perikanan di antaranya adalah rumput laut, sedangkan usaha yang berkaitan dengan pengolahan hasil laut adalah pengolahan ikan asin.

Hasil survei menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UEP cukup bervariasi antarkabupaten lokasi Coremap. Di Kabupaten Raja Ampat dan Biak, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UEP cukup tinggi, mencapai sekitar 85%. Tingginya keterlibatan masyarakat di kedua kabupaten ini berkaitan dengan kesepakatan masyarakat dan pengurus LPSTK untuk melibatkan semua kepala keluarga (rumah tangga) untuk menjadi anggota pokmas. Mereka mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan modal usaha melalui dana bergulir. Dengan kesepakatan ini, hampir semua rumah tangga mendapatkan pinjaman dana bergulir untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha. Hampir semua rumah tangga mendapatkan akses untuk menggunakan dana bergulir. Oleh karena itu, nilai pinjaman dana bergulir untuk tiap rumah tangga menjadi kecil, rata-rata Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000. Kecilnya nilai pinjaman ini mengakibatkan penggunaan dana bergulir untuk modal berusaha menjadi kurang efektif. Modal pinjaman tersebut umumnya digunakan untuk modal jualan pinang, makanan kecil, dan ongkos melaut (Widayatun, 2011 dan Romdiati, 2011).

Di beberapa kabupaten lainnya, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan UEP masih terbatas. Hal ini berkaitan dengan relatif kecilnya alokasi dana bergulir yang disalurkan, sementara jumlah masyarakat yang akan mengakses dana bergulir cukup banyak. Di sebagian lokasi Coremap, sosialisasi tentang adanya dana bergulir masih belum optimal sehingga tidak menjangkau keseluruhan masyarakat yang membutuhkan (Noveria dkk., 2011 dan Hidayati dkk., 2011).

Dalam perkembangannya, kegiatan UEP ini cukup beragam antarlokasi. Pada sebagian lokasi Coremap, kegiatan usaha ekonomi produktifnya cukup berhasil, namun sebagian lagi belum menghasilkan. Dari usaha kegiatan ekonomi produktif yang dilakukan, masyarakat sudah merasakan manfaatnya, yaitu menambah penghasilan keluarga. Kegiatan ekonomi produktif yang berkembang cukup baik di antaranya budi daya rumput laut di Kabupaten Sikka, Pangkep,

dan Selayar; kegiatan perdagangan di Kabupetan Wakatobi dan Buton; serta kegiatan pertanian di Kabupaten Raja Ampat dan Biak.



Sumber: BME Sosial-Ekonomi Coremap-LIPI, 2008

Diagram 2. Keterlibatan masyarakat dalam pokmas UEP dan Pokmas Konservasi di lokasi Coremap wilayah indoensia Bagian Timur, 2008.

Keterlibatan dalam Pokmas Konservasi dan Pembentukan DPL

Pokmas Konservasi atau Pokmaswas merupakan wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pengawasan terumbu karang di perairan laut. Kegiatan ini penting untuk mengurangi kegiatan-kegiatan ilegal yang merusak karang. Untuk mendukung kegiatan pokmaswas Coremap memfasilitasi perahu dan peralatan patroli dengan kelengkapan dan kapasitas yang cukup beragam antardesa. Sebagian desa menyediakan bahan bakar dan biaya patroli pokmaswas, sementara desa lainnya tidak mengalokasikan dana. Akibatnya, kegiatan patroli pokmaswas juga beragam antardesa, tergantung pada keaktifan masyarakat serta ketersediaan perahu dan kondisi peralatan penunjang serta dana operasional pada masing-masing desa. Sebagian pokmaswas cukup aktif melakukan patroli. Sebaliknya, terdapat pula Pokmaswas yang belum melakukan tugasnya karena berbagai kendala, seperti tidak tersedianya perahu, kurangnya bahan bakar, dan tidak tersedianya biaya operasional untuk melakukan patroli. Data survei menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pokmaswas di Kabupaten Raja Ampat, Buton, Sikka, dan Biak relatif baik. Sementara itu, di Kabupaten Wakatobi, Selayar, dan Pangkep, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pokmaswas masih relatif rendah (Diagram 2).

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terumbu karang tidak hanya teridentifikasi dalam keikutsertaannya pada kegiatan Pokmas Konservasi atau pokmaswas. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya

penyelamatan terumbu karang di lokasi Coremap telah mendorong tumbuhnya pengawasan mandiri masyarakat. Pengawasan mandiri merupakan kegiatan yang melibatkan peran aktif masyarakat untuk mengawasi kawasan terumbu karang dalam upaya menjaga dan melestarikan terumbu karang. Pengawasan mandiri dalam konteks ini tidak dilakukan oleh Pokmas Konservasi bentukan Coremap, tetapi pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela. Kegiatan pengawasan mandiri oleh masyarakat di lokasi Coremap umumnya dilakukan bersamaan dengan kegiatan melaut maupun ketika berada di lingkungan tempat tinggal karena lokasi kawasan terumbu karang, khususnya yang dijadikan sebagai daerah perlindungan laut (DPL), terletak di dekat permukiman penduduk.

Dampak dari pengawasan mandiri tersebut telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Manfaat ekonomi terlihat dari meningkatnya hasil tangkapan sebagai dampak meningkatnya tutupan karang hidup di DPL yang menjadi tempat tumbuh-kembangnya ikan-ikan di sekitar kawasan DPL. Sementara itu, manfaat sosial diperlihatkan dari adanya rasa kebersamaan untuk menjaga DPL karena mereka sudah mengetahui manfaat DPL terhadap kehidupannya. Manfaat yang dirasakan adalah jumlah ikan terlihat bertambah sehingga hasil tangkapan mereka juga meningkat. Selain jumlah ikan, jenis ikan yang sebelumnya sudah tidak bisa ditemukan di pantai, sekarang muncul lagi. Kenyataan ini membuat masyarakat nelayan untuk terus menjaga DPL, misalnya dengan membuat kesepakatan bersama untuk menjaga dan melindungi DPL, walaupun dengan berbagai keterbatasan sarana pengawasan yang dimiliki (Romdiati dan Sri Sunarti P, 2011; Widayatun dan Augustina Situmorang, 2011).

Kegiatan Pembangunan Sarana Desa (*Village Grant*)

Jenis bangunan sarana dan prasarana desa yang dibangun melalui Coremap di wilayah Indonesia timur umumnya berkaitan dengan penyediaan sarana ekonomi (TPI, jembatan, dermaga, instalasi listrik) dan sarana perbaikan lingkungan (pembangunan turap, pemecah ombak, penanaman mangrove). Selain itu, jenis bangunan lainnya adalah bangunan yang berkaitan dengan perbaikan sarana sanitasi lingkungan (penyediaan bak sampah, sarana air bersih, MCK) dan sarana sosial lainnya (tempat ibadah, bangunan taman kanak-kanak, gedung/bangunan tempat pertemuan desa). Pembangunan berbagai sarana tersebut, idealnya mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana desa juga disesuaikan dengan potensi kegiatan ekonomi yang bisa dikembangkan sehingga dirasakan manfaatnya.

Penentuan jenis sarana dan prasarana desa yang akan dibangun secara umum telah tertuang di dalam RPTK. Jika penyusunan RPTK melibatkan masyarakat, pembangunan sarana dan prasarana desa idealnya memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Rencana yang tertuang dalam RPTK tidak kaku. Artinya

apabila dalam perkembangannya masyarakat memerlukan jenis prasarana dan sarana desa yang tidak sesuai dengan yang ada di RPTK, masih memungkinkan untuk dilakukan perubahan melalui musyawarah.

Teknis pembangunan berbagai jenis sarana dan prasarana desa tersebut juga cukup bervariasi antardesa dan lokasi Coremap. Sebagian desa melibatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan mendapat upah sesuai standar yang berlaku. Sementara itu, di desa lainnya ada yang dilakukan secara bersama-sama melalui gotong-royong dan ada pula yang teknis pembangunannya dilakukan oleh pemborong.

Pembangunan berbagai jenis sarana dan prasarana desa di beberapa lokasi Coremap di Indonesia bagian timur secara umum telah mengakomodasi kepentingan masyarakat. Masyarakat dalam prosesnya berperan menentukan jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi wilayah tempat tinggalnya sehingga mereka bisa merasakan manfaat dari adanya pembangunan sarana dan prasarana tersebut. Di Kabupaten Wakatobi, khususnya desa-desa di Mola, pembangunan jembatan titian telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi peningkatan kesejahteraan penduduk. Jembatan-jembatan titian yang dibangun tidak hanya memudahkan hubungan antarwilayah di dalam desa itu sendiri, tetapi juga dengan wilayah luar desa dan berdampak secara tidak langsung terhadap kemajuan kegiatan ekonomi penduduk desa dan penduduk sekitarnya. Wilayah-wilayah yang tadinya hanya dapat dijangkau dengan menggunakan sampan atau perahu, sekarang sudah dapat dicapai dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda motor. Para pedagang keliling yang sebelumnya menggunakan sampan/perahu dalam menjajakan dagangannya, sejak adanya jembatan, dapat melakukannya dengan berjalan kaki atau naik motor. Hal ini membawa pengaruh yang positif terhadap wilayah pemasaran dari kegiatan perdagangan yang dilakukan penduduk setempat. Sebelum dibangunnya jembatan, tidak banyak penduduk yang berdagang sampai ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau karena belum adanya jembatan tersebut. Penduduk daerah setempatlah yang harus pergi keluar untuk membeli semua keperluan hidupnya. Namun, setelah dibangunnya jembatan-jembatan tersebut, banyak pedagang yang datang untuk menawarkan dagangannya sehingga warga setempat tidak perlu bersusah payah ke pasar bahkan sebagian ada yang membuka usaha di rumah sehingga memajukan perekonomian di daerah tersebut (Hidayati dkk., 2011).

Demikian pula dengan pembangunan sarana air bersih di lokasi Coremap Wakatobi dan Sikka. Masyarakat dapat merasakan manfaat sarana air bersih dalam kehidupan sehari-hari mereka. Penyediaan sarana air bersih ini tentunya sangat membantu masyarakat karena sebelum adanya sarana ini, mereka harus membeli air bersih dari pedagang air keliling. Dalam sehari, paling tidak

masyarakat harus membeli empat jerigen air untuk memenuhi kebutuhan air bersih, seperti untuk masak dan minum. Namun saat ini, dengan adanya air bersih dari Coremap, mereka tidak perlu lagi membeli air sehingga uang untuk membeli air dapat mereka manfaatkan untuk keperluan lainnya.

Manfaat dari pembangunan sarana desa yang lainnya adalah tambatan perahu (dermaga/pelantar) yang telah memberikan manfaat sangat besar bagi nelayan dan masyarakat pesisir di lokasi Coremap. Dengan adanya tambatan perahu, nelayan menjadi lebih mudah menambatkan perahunya, proses naik turun nelayan/penumpang dan hasil tangkapan pun menjadi lebih mudah serta konstruksinya yang kokoh pun membuat perahu yang ditambatkan menjadi lebih aman. Selain itu, dengan terpusatnya kegiatan menurunkan hasil laut di satu tempat, yaitu di tambatan perahu, mengundang para pembeli hasil tangkap, seperti tengkulak maupun konsumen rumah tangga, untuk datang langsung membeli ikan. Hal ini mempermudah nelayan memasarkan hasil tangkapannya.

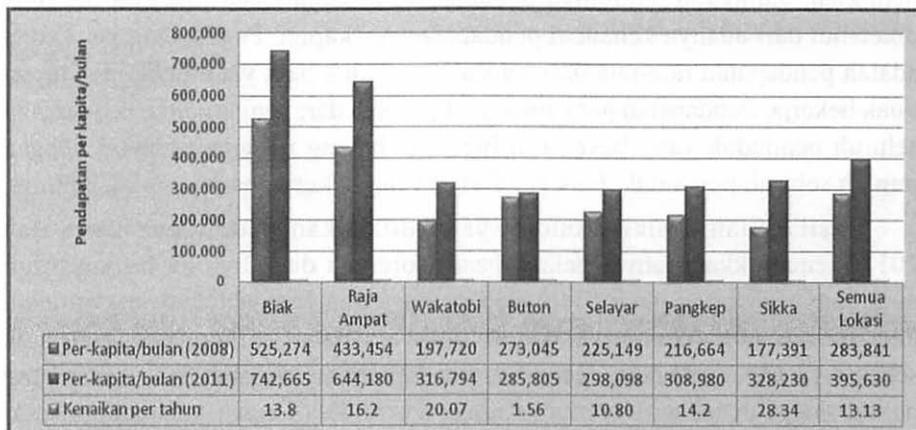
DAMPAK COREMAP TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Dampak keberhasilan Coremap dari aspek sosial-ekonomi yang diharapkan adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di lokasi program. Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan per kapita. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika mempunyai pendapatan per kapita di atas kebutuhan fisik minimum/garis kemiskinan. Artinya, setiap individu telah terpenuhi kebutuhan fisiknya untuk hidup layak. Dengan demikian, gambaran terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dari adanya kenaikan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata dari seluruh penduduk baik yang bekerja maupun tidak bekerja. Pendapatan per kapita ini diperoleh dari penjumlahan pendapatan seluruh penduduk yang bekerja di berbagai bidang pekerjaan dibagi dengan jumlah seluruh penduduk, baik penduduk yang bekerja maupun tidak bekerja.

Hasil kajian sosial-ekonomi yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2011 menunjukkan bahwa pelaksanaan Coremap di Indonesia bagian timur mempunyai dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat di tujuh kabupaten di Indonesia timur naik sebesar 13,13% per tahun. Kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang paling tinggi di lokasi Coremap Kabupaten Sikka, dengan kenaikan sebesar 28,3%. Kabupaten lainnya yang mengalami kenaikan pendapatan per kapita di atas rata-rata adalah kabupaten Wakatobi, Raja Ampat, Biak, dan Pangkep. Ada dua kabupaten yang mengalami kenaikan pendapatan di bawah rata-rata, yaitu Kabupaten Selayar dan Buton (Diagram 3).

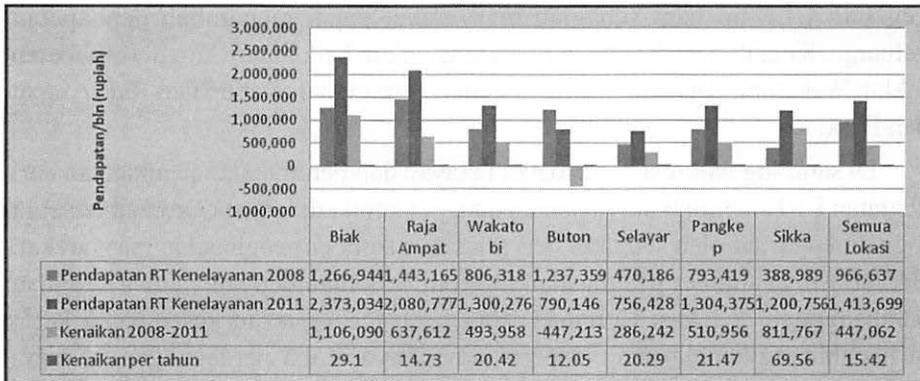
Tingginya kenaikan pendapatan per kapita di lokasi Coremap Kabupaten Sikka disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah kenaikan hasil panen rumput laut. Setelah mengalami masa paceklik selama beberapa tahun (panen rumput laut gagal) karena hama “ice-ice”, masyarakat di lokasi Coremap Kabupaten Sikka (terutama yang di wilayah pulau, Kojagete, Kojadoi, dan Pemana) sudah mulai merasakan hasil panen rumput laut yang membaik. Meskipun belum optimal, hasil panen rumput laut dapat menambah pendapatan keluarga. Kegiatan Coremap mempunyai kontribusi pada peningkatan hasil panen rumput laut di Kabupaten Sikka. Sebagian masyarakat yang mempunyai usaha budi daya rumput laut ini mendapat pinjaman modal dari dana bergulir Coremap untuk biaya produksi budi daya rumput laut (bibit rumput laut, tali, tiang). Modal tersebut sangat diperlukan mengingat beberapa tahun sebelumnya para petani rumput laut ini terpuruk kondisi ekonominya karena panen rumput laut yang gagal.

Secara umum, peningkatan pendapatan per kapita di kabupaten lokasi Coremap di Indonesia bagian timur dipengaruhi oleh naiknya pendapatan nelayan. Hampir di semua kabupaten lokasi Coremap di wilayah timur pendapatan nelayan naik cukup signifikan dengan kenaikan rata-rata semua lokasi sekitar 15%. Pendapatan nelayan di Kabupaten Sikka naik sebesar 69% dan di Kabupaten Wakatobi, Selayar, dan Pangkep naik sekitar 20%. Kabupaten yang menunjukkan penurunan pendapatan nelayan adalah Kabupaten Buton (Diagram 4).



Sumber: BME Sosial-Ekonomi, Coremap-LIPI, Tahun 2008 dan 2011

Diagram 3. Perkembangan pendapatan per kapita di lokasi Coremap Indonesia Bagian Timur (2008-2011)



Sumber: BME Sosial-Ekonomi, Coremap-LIPI, Tahun 2008 dan 2011

Diagram 4. Perkembangan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenyelanaan tahun 2008–2011

Berkurangnya kegiatan penangkapan secara ilegal (penggunaan bom, bius, dan pukot harimau) sejak pelaksanaan Coremap telah berdampak positif pada meningkatnya populasi ikan. Pada awal penerapan larangan penangkapan ikan secara ilegal, hasil tangkapan nelayan menurun. Namun, seiring dengan berkurangnya kegiatan penangkapan ilegal, populasi ikan mulai bertambah dan hasil tangkapan nelayan meningkat. Selain berkurangnya kegiatan penangkapan ilegal, naiknya pendapatan nelayan juga dipengaruhi oleh peningkatan teknologi dan armada tangkap. Peningkatan teknologi dan armada tangkap ini terlihat dari semakin tingginya kepemilikan perahu motor pada masyarakat nelayan di lokasi Coremap. Kemudahan pemasaran hasil laut juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan nelayan. Kegiatan pembangunan dari berbagai sektor terkait, termasuk di antaranya oleh Coremap yang telah dilaksanakan di desa-desa tersebut, seperti pembangunan sarana dan prasarana sosial-ekonomi (misalnya pasar, dermaga, jembatan), sarana komunikasi dan transportasi sangat menunjang kemudahan pemasaran hasil tangkapan nelayan yang pada akhirnya mempengaruhi peningkatan pendapatan. Kondisi ini terutama terjadi di Kabupaten Raja Ampat, Biak, Wakatobi, dan Pangkajene Kepulauan.

Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sifatnya pemberian bantuan/pinjaman (*cash program*) juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif di luar bidang kenyelanaan. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui Coremap di wilayah Indonesia bagian timur adalah kegiatan UEP yang mendapat bantuan modal dari dana bergulir. Melalui kegiatan UEP masyarakat diberi pelatihan dan bantuan modal untuk mengembangkan usaha, seperti usaha budi daya rumput laut, berjualan ikan, warung sembako, dan jual bahan bakar (BBM). Adanya

kegiatan UEP ini bagi sebagian masyarakat dapat menambah pendapatan keluarga. Kegiatan UEP yang berkembang cukup baik antara lain di Kabupaten Sikka, Wakatobi, dan Buton serta kegiatan pertanian di Kabupaten Raja Ampat dan Biak.

Di samping naiknya pendapatan nelayan dan peningkatan pendapatan dari kegiatan UEP, meningkatnya pendapatan per kapita di lokasi Coremap tersebut juga dipengaruhi oleh semakin bervariasinya sumber penghasilan masyarakat. Bervariasinya sumber penghasilan tersebut berkaitan dengan adanya kegiatan pembangunan di lokasi Coremap yang telah menciptakan kesempatan kerja di luar bidang kenelayanan, seperti tumbuhnya usaha perdagangan (warung sembako, warung makan, jual ikan) dan jasa (ojek, sopir, tukang). Kondisi ini terjadi di Kabupaten Wakatobi dan Raja Ampat. Sebagai kabupaten baru yang sedang berkembang, pelaksanaan pembangunan yang bersifat fisik dan nonfisik di Kabupaten Wakatobi masih berlangsung hingga saat ini. Dampak dari adanya berbagai program pembangunan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik tersebut adalah kegiatan ekonomi masyarakat juga berkembang. Lapangan kerja menjadi terbuka di berbagai sektor, baik pemerintah maupun nonpemerintah. Kondisi ini turut memengaruhi pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diterima keluarga tidak hanya bersumber pada satu jenis pekerjaan. Rumah tangga nelayan, selain mendapatkan penghasilan dari hasil menangkap ikan juga mendapat tambahan pendapatan dari sumber lain, misalnya dari sektor jasa (menjadi tukang ojek, usaha warungan atau menjadi pekerja serabutan di berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan). Meskipun masih dalam skala kecil pembangunan sarana dan prasarana desa yang telah dilaksanakan oleh Coremap seperti jembatan desa dan fasilitas air bersih juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Adanya jembatan memudahkan para pedagang keliling dalam menjajakan dagangannya. Sementara itu, pembangunan sarana air bersih membantu menghemat pengeluaran rumah tangga (Hidayati dkk., 2011).

Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten baru juga sedang melaksanakan pembangunan fisik dan nonfisik yang telah dimulai sejak tahun 2006. Pelaksanaan pembangunan difokuskan di wilayah Waigeo Selatan, terutama sekitar Waisai sebagai ibu kota Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan pembangunan ini berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan menciptakan berbagai peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Kegiatan nelayan menjadi lebih berkembang karena tersedianya pangsa pasar hasil tangkap nelayan berkaitan dengan meningkatnya permintaan kebutuhan ikan. Kenaikan permintaan ikan ini karena adanya peningkatan jumlah penduduk di Waisai dan desa-desa sekitarnya. Jumlah penduduk di Waisai dan sekitarnya meningkat karena adanya perpindahan penduduk dari Sorong dan desa-desa di wilayah

Kabupaten Raja Ampat untuk bekerja di pemerintahan ataupun sektor lain, seperti perdagangan dan jasa, konstruksi, dan pendidikan. Selain peningkatan permintaan ikan, bertambahnya penduduk di di Waisai dan sekitarnya juga berdampak pada meningkatnya permintaan sayur-sayuran dan buah-buahan. Hal ini menjadi peluang bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari kegiatan pertanian/perkebunan. Kegiatan bertanam sayuran dan buah-buahan umumnya dilakukan oleh para ibu karena para bapak lebih mementingkan untuk bekerja mencari ikan di laut. Oleh karena itu, dengan berkembangnya kegiatan pertanian ini, para ibu juga berperan meningkatkan pendapatan keluarga. Dalam melaksanakan usaha pertaniannya para ibu memperoleh bantuan pinjaman modal untuk membeli bibit sayuran (bayam, kacang, buncis) dan pupuk serta obat-obatan dari dana bergulir Coremap (Widayatun, 2011).

Peningkatan pendapatan per kapita di Kabupaten Buton, menempati urutan terendah dibandingkan kabupaten lainnya di Indonesia bagian timur. Pendapatan per kapita di kabupaten ini hanya meningkat sebesar 1,56% per tahun selama kurun waktu 2008–2011. Rendahnya peningkatan pendapatan per kapita di kabupaten ini berkaitan dengan menurunnya hasil tangkap nelayan. Sebagian nelayan di wilayah ini merupakan nelayan yang target tangkapannya adalah ikan teri. Produksi ikan teri menunjukkan penurunan yang besar selama enam bulan terakhir. Sebagian nelayan menyebutkan bahwa pada tahun awal tahun 2011 merupakan bulan-bulan musim “paceklik”, produksi ikan teri menurun cukup drastis. Hal ini cukup berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga, terutama rumah tangga yang hanya mengandalkan sumber pendapatan dari usaha bagan ikan teri. Data tentang pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2008–2012 hasil tangkap nelayan turun. Penurunan pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan mencapai lebih dari 12% selama kurun waktu 2008–2012.

Sementara itu, pelaksanaan dana bergulir belum bisa menambah pendapatan rumah tangga secara signifikan. Pemanfaatan dana bergulir sebagian besar untuk usaha perdagangan (dagang kue, warungan, jual ikan) dan untuk menambah modal melaut. Pemanfaatan dana bergulir untuk kepentingan nonekonomi, seperti untuk biaya pendidikan dan konsumsi rumah tangga di kabupaten ini relatif kecil. Namun, karena skala usaha perdagangan relatif kecil maka hasilnya belum dapat menambah pendapatan rumah tangga. Sementara itu, usaha di bidang kenelayanan (bagan ikan teri) sedang mengalami masa “paceklik”.

PENUTUP

Peran masyarakat pesisir dan pulau kecil sebagai pengguna utama sumber daya laut sangat menentukan keberhasilan upaya pelestarian terumbu karang yang

dilaksanakan melalui Coremap. Peran dan keterlibatan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh pemahaman mereka terhadap maksud dan tujuan Coremap serta manfaat yang diperoleh dengan adanya kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam upaya melibatkan masyarakat, pada awal program, Coremap melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pelestarian terumbu karang dan manfaatnya bagi kehidupan masyarakat. Kegiatan ini penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program.

Berdasarkan hasil kajian sosial-ekonomi Coremap yang dilakukan pada tahun 2008 dan 2011, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan Coremap di wilayah Indonesia bagian timur secara umum belum optimal. Di sebagian kabupaten, seperti Kabupaten Biak, Raja Ampat, dan Buton peran masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Coremap relatif tinggi. Hal tersebut terindikasi dari keterlibatannya dalam pembentukan kelembagaan, penyusunan RPTK, kegiatan UEP, dan pengawasan serta pembentukan daerah perlindungan laut (DPL). Sementara itu, di kabupaten lainnya, peran dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan Coremap masih terbatas. Berbagai faktor yang memengaruhi terbatasnya peran dan keterlibatan masyarakat tersebut di antaranya masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang beberapa kegiatan Coremap yang dilaksanakan di wilayahnya.

Pelaksanaan kegiatan Coremap di wilayah Indonesia bagian timur telah membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikasinya adalah pendapatan per kapita di semua kabupaten lokasi Coremap di wilayah ini menunjukkan kenaikan. Hasil BME menunjukkan kenaikan pendapatan per kapita per tahun mencapai sekitar 13%. Gambaran peningkatan pendapatan per kapita untuk tiap kabupaten bervariasi, berkisar antara 10,80% sampai dengan 28,54%. Kabupaten dengan kenaikan pendapatan per kapita yang cukup tinggi di antaranya adalah Kabupaten Sikka, Wakatobi, Biak, dan Raja Ampat. Sementara itu, peningkatan pendapatan per kapita untuk dua kabupaten lainnya, Kabupaten Buton dan Selayar, relatif kecil.

Perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi Coremap di Indonesia bagian timur tersebut tidak semata-mata sebagai dampak langsung dari kegiatan Coremap. Namun, berbagai kegiatan Coremap telah meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Penurunan kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan dengan menggunakan bom, bius, dan pukat harimau, sebagai dampak dari keberhasilan Coremap dalam penyadaran masyarakat berpengaruh pada peningkatan pendapatan nelayan dari kegiatan kenelayanan. Kondisi ini hampir terjadi di seluruh kabupaten lokasi Coremap. Sementara itu, kegiatan Coremap lainnya seperti UEP serta pembangunan sarana dan prasarana desa juga

telah menjadi faktor pendorong masyarakat untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiati, Devi dkk. 2011. *Pengelolaan Sumber Daya Laut dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Buton*. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap- LIPI
- Biro Pusat Statistik. 2011. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Daliyo, Zainal Fathoni, Soewartoyo, dan Sumono. 2011. *Pelestarian Sumber Daya Laut, Partisipasi dan Kesejahteraan Penduduk*. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
- Hidayati, Deny, Ngadi dan Rusli Cahyadi. 2011. *Pengelolaan Terumbu Karang Melalui Coremap di Wakatobi Peran Masyarakat dan Dampaknya terhadap Pendapatan*. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
- Ndraha, Taliziduhu. 1990. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Ngadi, Toni Soetopo, Suko Bandiyono dan Masyhuri Imron. 2011. *Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kabupaten Kepulauan Selayar*. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
- Noveria, Mita, Dewi Harfina, dan Maeirina Ayumi Malamassam. 2011. *Pelestarian Terumbu Karang Berbasis Masyarakat Suatu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pangkajene Kepulauan*. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
- Romdiati, Haning dkk. 2011. *Pelestarian Terumbu Karang Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Biak Numfor*. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
- Suharsono. 2007. "Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia". *Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Ilmu Oseanografi*. Jakarta: Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI.
- Widayatun dan Augustina Situmorang. 2011. *Penyelamatan Terumbu Karang di Kabupaten Raja Ampat: Partisipasi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Leuser Cipta Pusataka, Coremap-LIPI.
- World Bank. 1995. *Understanding Community Participation*. Washington D.C.: World Bank.
- Tempo. 2012. <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/31/061438910/Sepertiga-Terumbu-Karang-di-Indonesia-Rusak>.